

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2024

KECAMATAN BULU



KECAMATAN BULU

Alamat : Jl. Rembang – Blora Km. 19 Bulu Rembang

Website : kecbulu.rembangkab.go.id

E-mail : kecbulu+1@rembangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bulu Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Kecamatan Bulu Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran. Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Kecamatan Bulu mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, 18 Januari 2025
CAMAT BULU



MOCHAMAD SOLEH, SE, MM.

Pembina

NIP. 19700505 199003 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Bulu tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana target kinerja, tingkat capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis perangkat daerah. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bulu Tahun 2021-2026 mengacu pada Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2021-2026, di mana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, dan program pembangunan seperti telah dirumuskan dalam renstra.

Tujuan Kecamatan Bulu adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan 1 sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan, dan terdapat 2 indikator kinerja utama meliputi Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian IPP dan IKM menggunakan formulasi sebagai berikut:

IPP → Nilai Indek = $\sum (\text{nilai aspek } n \times \text{bobot aspek } n)$

IKM → IKM = Total dari nilai persepsi per unsur : total unsur
yang terisi x nilai penimbang

Keseluruhan sasaran yang ditargetkan memiliki nilai capaian relatif baik yang dapat dikategorikan pada tingkatan berhasil. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.3	3.33	100%	Sangat Tinggi
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	83.28	104.10%	Sangat Tinggi

Capaian indikator sasaran dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) Program, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut secara umum disebabkan:

1. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan skala prioritas sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektifitas.
2. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan
4. Penetapan indikator sasaran pada masing masing kegiatan.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Bulu menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing seksi.
2. Terbatasnya jumlah anggaran kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan hanya asal dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan administratif.

Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Bulu telah mengelola anggaran sebesar Rp2.142.298.190,00 dengan realisasi sebesar Rp2.063.396.731,00 atau 96.32%. Sedangkan pada Tahun 2023 Anggaran Kecamatan Bulu Rp1.873.870.592,00 dengan realisasi Rp1.793.654.994,00 atau 95.72%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 13,07% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iiiv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	9
1.2.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	11
1.2.4 Dukungan Sumber Daya Manusia	12
1.2.5 Dukungan Sarana Prasarana	13
1.2.6 Anggaran.....	14
1.3 Dasar Hukum.....	14
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	15
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	16
BAB II	19
PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	23
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024	24
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	31
BAB III	32
AKUNTABILITAS KINERJA	32

3.1	Capaian Kinerja.....	32
3.1.1	Skala Capaian Kinerja.....	33
3.1.2	Membandingkan antara target & realisasi tahun pelaporan .	33
3.1.3	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	39
3.1.4	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	45
3.1.5	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	46
3.1.6	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	47
3.1.7	Analisis atas efisiensi & efektivitas penggunaan sumber daya	54
3.1.8	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	557
3.2	Realisasi Anggaran	63
BAB IV		66
PENUTUP.....		66
LAMPIRAN		68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Pegawai Kecamatan Bulu.....	12
Tabel 1.2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 1.3 Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang.....	13
Tabel 1.4 Sarana Prasarana Kantor	13
Tabel 1.5 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	14
Tabel 1.6 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Kecamatan Bulu	16
Tabel 1.7 Rekomendasi dan Tindak Lanjut AKIP 2023	17
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	22
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024	22
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bulu Tahun 2024	23
Tabel 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan	24
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah	24
Tabel 2.6 Rencana Kinerja Tahun 2024	27
Tabel 2.7 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	27
Tabel 2.8 Struktur Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2024	28
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	333
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024	33
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	39
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	4545
Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Bulu dan Kecamatan Kaliori	46
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	47
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	54
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan...	58
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	9
Gambar 1.1 Cascading Kecamatan Bulu.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kecamatan Bulu diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Kecamatan Bulu Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian

kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Kecamatan Bulu:

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Bulu mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Bulu mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam pelaksanaan tugasnya Camat dibantu oleh:

1. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kesehatan, kearsipan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, dan kearsipan di lingkungan kecamatan;

- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat memiliki dua subbag yaitu:

1.1 Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan

ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;

b. pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;

c. pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;

d. evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;

b. peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

- c. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan; peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - d. pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - f. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha; pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
 - g. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan;
 - b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - d. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
 - f. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 - g. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
 - h. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

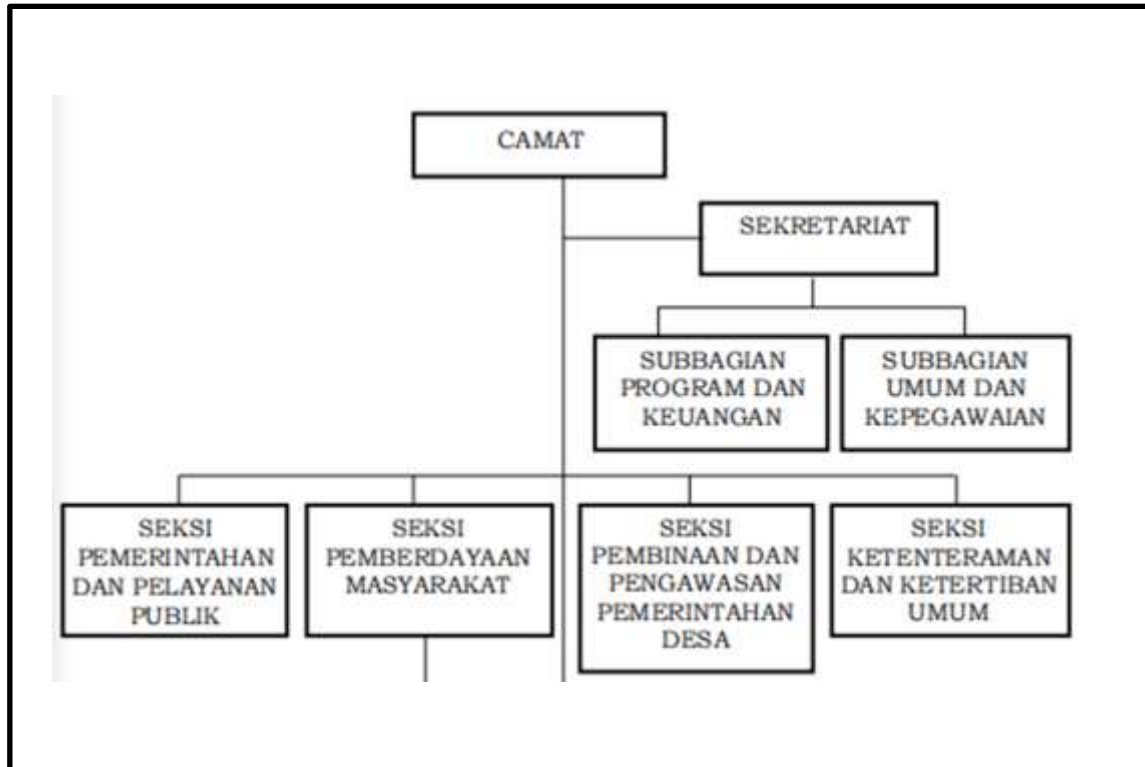
- i. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - j. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - e. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
 - g. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - h. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 - i. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - j. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - k. fasilitasi kerjasama antardesa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
 - l. fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 - m. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 - n. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;

- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
 - a. koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 - c. hamonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - d. koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - e. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
 - f. fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - g. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - h. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
 - i. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan;
 - j. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - k. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi

dan tatakerja Kecamatan Bulu. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Bulu.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bulu

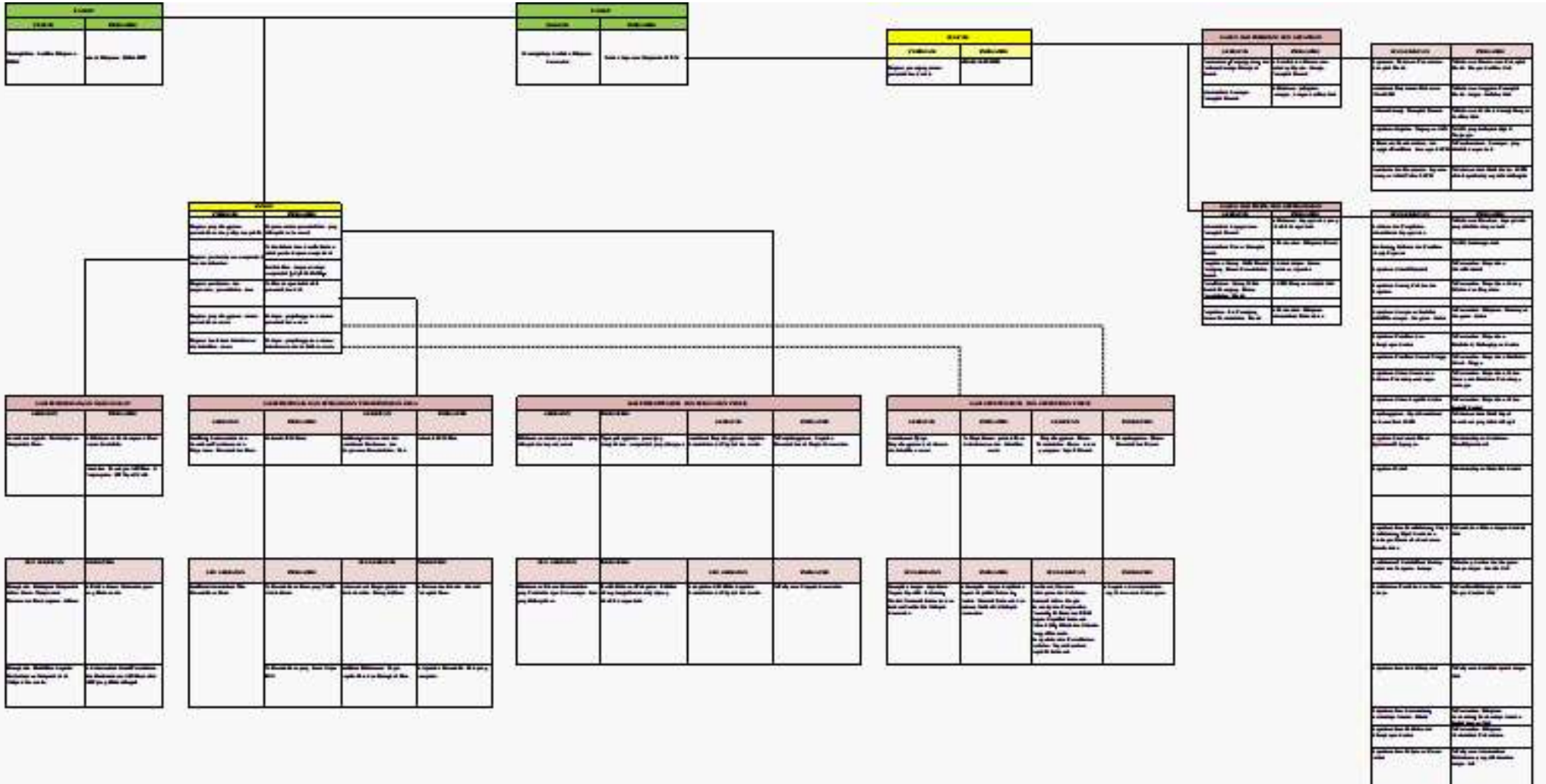


Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021

1.2.2 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Rembang, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2021–2026. Kecamatan Bulu dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.2 Cascading Kecamatan Bulu



1.2.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu :

- a. Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan;
- c. Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku;
- d. Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;
- e. Masih tingginya angka kemiskinan;
- f. Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular wabah, epidemi, dan pandemi) dan;
- g. Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu **“Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya Penguatan Kemandirian Desa”**.

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Bulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
- 2) Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1.2.4 Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bulu didukung oleh personil, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rincian Pegawai Kecamatan Bulu

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	4 orang
4.	Kepala Sub Bagian	2 orang
5.	Pelaksana	6 orang
6.	Tenaga Harian Lepas	8 orang
Jumlah		22 orang

Tabel 1.2 Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Pendidikan						JML
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Camat	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekcam	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	-	3	1	4
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	2	-	2
5.	Pelaksana	-	1	3	-	2	-	6
6.	Tenaga Harian Lepas	1	-	1	3	3	-	8
jumlah		1	1	4	3	11	2	22

Tabel 1.3 Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Jabatan	golongan				JML
		I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	1	1
2.	Sekcam	-	-	-	1	1
3.	Kepala Seksi	-	-	4	-	4
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	2	-	2
5.	Pelaksana	-	2	4	-	6
jumlah		0	2	10	2	14

1.2.5 Dukungan Sarana Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Sarana Prasarana Kantor

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI SAAT INI
	Alat Berat/Genset	1	unit	Rusak Ringan
	Alat Angkutan/Kendaraan roda 4	2	unit	Baik
	Alat Angkutan/Kendaraan roda 2	14	unit	2RB (Penghapusan), 9 Baik, 3 RB
	Alat Pertanian	3	unit	1 Baik, 2RB
	Mesin Ketik	1	unit	1 RB
	Almari & Rak Kayu	8	unit	8 Baik
	Papan Nama Instansi	14	unit	14 Baik
	Mebelair	283	buah	283 Baik
	AC	4	unit	1 Baik, 3RB
	Kipas Angin	8	unit	8 Baik
	Alat Rumah Tangga Lainnya	10	unit	2 Baik, 8 RB
	Meja& Kursi Pejabat	30	buah	30 baik
	Peralatan Studio video dan film	3	unit	1 Baik, 2 RB

	Komputer & Laptop	22	unit	10 Baik, 12 RB
	Printer	10	unit	6 Baik, 4 RB
	Bangunan Gedung	11	unit	11 Baik

1.2.6 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Bulu. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Bulu:

Tabel 1.5 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
APBD	2023	Rp1.873.879.592,-	Rp1.793.654.994,-	95.72%
APBD	2024	Rp2.142.298.190	Rp2.063.396.731,-	96.32%

Sumber : DPA Kecamatan Bulu

Anggaran yang dikelola Kecamatan Bulu pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp268.418.598,- atau 12.53%, dengan realisasi sebesar Rp2.063.396.731,- atau 96.32%.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Bulu ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bulu Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang telah disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang melalui surat tanggal 15 Juli 2024, nomor: 700/030.D/LHE/INSP/2024, tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023 pada Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Adapun hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 Kecamatan Bulu, setiap komponen disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.6 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Kecamatan Bulu

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Th. 2022	Th. 2023	
				Penilaian Mandiri	Penjaminan Kualitas
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60	21,60	18,90
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,80	23,10	18,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,05	10,05	8,70
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	25	13,75	18,75	18,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,21	75,90	64,35
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB	B

Dari hasil evaluasi AKIP 2023 ini dapat disampaikan rekomendasi beserta tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 1.7 Rekomendasi dan Tindak Lanjut AKIP 2023

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN KINERJA	
1.1	a. Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu perihal penerbitan Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja PD	Membuat surat usulan kepada Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang terkait Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja PD
	b. Melampirkan Pedoman Penyusunan Dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, RKA PD	Pedoman penyusunan renstra, renja, perjanjian kinerja dan RKA PD sudah di upload di website kecbulu.rembangkab.go.id
1.2	Memperbaiki rencana aksi tahun 2024 dengan melengkapi jadwal monitoring	Memperbaiki rencana aksi tahun 2024 dengan jadwal monitoring
1.3	Publikasi dokumen pada web resmi Kecamatan Bulu agar dibuat sesuai nama dokumen, tidak dikelompokkan di satu link "Dokumen SAKIP"	sudah melakukan publikasi dokumen pada web kecbulu.rembangkab.go.id sesuai dengan kelompok dokumen
1.4	Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu penunjang urusan pemerintahan (perencanaan/diklat) menyelenggarakan Bimtek Penjenjangan Kinerja/Pohon Kinerja	Membuat surat usulan kepada Bappeda Kabupaten Rembang untuk menyelenggarakan bimtek pohon kinerja
1.5	Memperbaiki pohon kinerja dengan memperhatikan faktor kunci atas kinerja yang ingin dicapai serta kaidah penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021	Memperbaiki Penjenjangan Kinerja/Pohon Kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021
1.6	Dalam penyusunan Renja, KUA, RKA maupun DPA ke depan (Perubahan Tahun 2024) agar konsisten, baik nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan baik indikator kinerja, target dan pagu anggaran	Memperbaiki Perubahan Renja tahun 2024 dan Renja Tahun 2025 sesuai dengan nomenklatur yang berlaku
1.7	a. Menambahkan sasaran sub kegiatan, indikator sub kegiatan beserta targetnya untuk Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV Tahun 2024	Memperbaiki Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2024
	b. Menambahkan sub kegiatan, indikator kinerja sub kegiatan, target dan jadwal monev pada renaksi tahun 2024	Memperbaiki rencana aksi tahun 2024 dengan jadwal monitoring
	c. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana aksi dan pencapaian kinerja secara berkala dengan melibatkan seluruh PPTK/Pejabat struktural maupun fungsional yang diadministrasikan dan didokumentasikan secara tertib	Mendokumentasikan kegiatan monev sampai dengan triwulan II Tahun 2024
2	PENGUKURAN KINERJA	
2.1	Mengusulkan kepada unit organisasi pegampu (Bagian Adm. Pembangunan Setda) perihal penerbitan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Membuat surat usulan kepada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Rembang untuk menerbitkan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
2.2	Melengkapi Profil Indikator Kinerja dengan definisi operasional program dan kegiatan	Memperbaiki Profil Indikator Kinerja kecamatan

2.3	Dalam pengambilan keputusan pada saat proses pengukuran kinerja organisasi diharapkan pimpinan senantiasa terlibat langsung dan didokumentasikan/ diadministrasikan secara tertib	Mendokumentasikan kegiatan pengukuran kinerja Tahun 2024
2.4	Melengkapi data hasil pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dokumen LKjIP tahun 2023 Bab III	Memperbaiki data hasil pengukuran kinerja pada dokumen LKjIP Tahun 2023 BAB III
2.5	Menyusun Laporan Hasil Monitoring/evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan 1 dan 2 Tahun 2024	Menyusun Laporan hasil monitoring/ evaluasi renja TW 1 dan 2 Tahun 2024
2.6	Agar pengukuran kinerja sepenuhnya fokus pada pengukuran capaian kinerja mulai dari sasaran, program, kegiatan sampai pada sub kegiatan hendaknya dilaksanakan secara berkala (minimal triwulanan) dengan melibatkan seluruh pejabat struktural termasuk PPTK selaku penanggung jawab sekaligus pengendali teknis kegiatan	mendokumentasikan kegiatan pengukuran kinerja dengan melibatkan kasi/kasubag
2.7	Masing-masing unit kerja (sekretariat, sub bag dan seksi) agar menyusun Laporan Kinerja secara berkala (Triwulanan I s/d IV) dengan mempedomani Rencana Aksi tahun 2024 yang telah ditetapkan	laporan triwulanan dengan mempedomani rencana aksi tahun 2024
3	PELAPORAN KINERJA	
3.1	Melengkapi Dokumen LKjIP dengan informasi perbandingan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan	Memperbaiki BAB III LKjIP Tahun 2023
3.2	Menyajikan perbandingan realisasi kinerja sejenis dengan Perangkat Daerah lainnya	Memperbaiki BAB III LKjIP Tahun 2023
3.3	Menginformasikan analisa/penjelasan faktor pendukung atas keberhasilan kinerja dan faktor penghambat/kendala atas kegagalan yang dihadapi beserta upaya-upaya yang akan dilakukan	Memperbaiki BAB III LKjIP Tahun 2023
3.4	untuk menghitung ulang efisiensi berdasarkan formulasi yang tepat	Memperbaiki BAB III LKjIP Tahun 2023
3.5	Secara berkala senantiasa melakukan konsolidasi internal sebagai upaya/strategi untuk peningkatan kinerja dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat maupun kinerja pemerintah desa, yang diadministrasikan/ didokumentasikan secara tertib	Memperbaiki BAB III LKjIP Tahun 2023
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
4.1	Menyusun Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi atas penilaian mandiri implementasi SAKIP	menyusun matrik tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak terlepas dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan yaitu untuk pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Rembang, meliputi:

2.1.1 Visi

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2026. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional kedalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah: **“REMBANG GEMILANG 2026”**

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut: **Rembang Gemilang** menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang

rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEMati**, gamp**IL** dan gambl**ANG**:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan Keuangan Desa dan peningkatan Pendapatan Desa.

Kecamatan menjadi bagian dalam mencapai Misi I: “Mengembangkan Profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”. Dari Misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Kecamatan termasuk dalam upaya mencapai Tujuan “Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”. Sasaran dari tujuan tersebut dalam konteks Kecamatan adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik”. Selanjutnya untuk mendukung pencapaian Sasaran Daerah, pada Kecamatan telah ditetapkan sasaran beserta indikatornya yakni: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bulu:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik	0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
1.1.1		1.1.1.1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	78	79	80	81	82

Sumber : Renstra KECAMATAN BULU Periode 2021 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1.1 #.1	Indeks Pelayanan Publik	indeks	Untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang	Nilai Indeks = $\sum(\text{nilai aspek } n \times \text{bobot aspek } n)$	Olahan Data OPD
1.1.1.1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan	1.1.1.1#0.1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik	IKM = Total dari nilai persepsi per unsur: total unsur yang terisi x nilai penimbang	Olahan Data OPD

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya		
1.1.2	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1.1.1. #.1	Nilai SAKIP	angka	Hasil evaluasi SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah.	Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SAKIP pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.	Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

Sumber: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bulu Tahun 2024

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra 2021-2025 untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bulu Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik	Angka	3.3
1.1.1		1.1.1.1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	80

Tabel 2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan public baik perizinan dan non perizinan	1. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan 2. Peningkatan SDM pelayanan baik di desa maupun kecamatan 3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2024 :

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Bulu

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik		3.3
1.1.1		1.1. 1.1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	80

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Bulu tahun 2024

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan

kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Camat Bulu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2024

No	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.3
1.1.1.1	Sasaran; Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
1.1.2	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP	66

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Bulu:

Tabel 2.7 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Bulu Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu	66 angka	1.996.418.190
1.1.1.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90%	-
1.1.1.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	-
1.1.1.1.1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	-
1.1.1.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	1.578.760.000

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.1. 1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 org/bl	1.545.000.000
1.1.1.1. 1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	33.760.000
1.1.1.1. 1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	-
1.1.1.1. 1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	-
1.1.1.1. 1.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	-
1.1.1.1. 1.3.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	-
1.1.1.1. 1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan umum	100%	39.203.190
1.1.1.1. 1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	-
1.1.1.1. 1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	-
1.1.1.1. 1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	13.750.000
1.1.1.1. 1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	6.386.790
1.1.1.1. 1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	-
1.1.1.1. 1.4.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	11.106.400
1.1.1.1. 1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	7.960.000
1.1.1.1. 1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%	-
1.1.1.1. 1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	-
1.1.1.1. 1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	150.670.000
1.1.1.1. 1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	-
1.1.1.1. 1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	11.000.000
1.1.1.1. 1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	139.670.000
1.1.1.1. 1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	93%	227.785.000
1.1.1.1. 1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	6.785.000
1.1.1.1. 1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 unit	215.000.000

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi		
1.1.1.1. 1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	6.000.000
1.1.1.1. 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	98%	59.000.000
1.1.1.1. 2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	59.000.000
1.1.1.1. 2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	59.000.000
1.1.1.1. 2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	-
1.1.1.1. 2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	-
1.1.1.1. 2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	96%	-
1.1.1.1. 2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	-
1.1.1.1. 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ? Rp. 20.000.000,-	6 desa	28.700.000
		Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%	
1.1.1.1. 3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa dan Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	28.700.000
1.1.1.1. 3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 lembaga	15.200.000
1.1.1.1. 3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	13.500.000
1.1.1.1. 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	46.180.000
1.1.1.1. 4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	46.180.000
1.1.1.1. 4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	46.180.000
1.1.1.1. 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	6.000.000

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.1.5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	6.000.000
1.1.1.1.5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	6.000.000
1.1.1.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	95%	6.000.000
1.1.1.1.6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	90 angka	6.000.000
1.1.1.1.6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 dokumen	3.000.000
1.1.1.1.6.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	1.000.000
1.1.1.1.6.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	-
1.1.1.1.6.1.4	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16 dokumen	2.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bulu Tahun 2024

**Tabel 2.8 Struktur Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kecamatan Bulu Tahun 2024**

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu APBD	APBD Pergeseran 8	Realisasi Anggaran
KECAMATAN BULU		2,180,656,000	2,142,298,190	2,063,396,731
UNSUR KEWILAYAHAN		2,180,656,000	2,142,298,190	2,063,396,731
KECAMATAN		2,180,656,000	2,142,298,190	2,063,396,731
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu	2,088,856,000	1,996,418,190	1,919,486,731
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	1,726,515,000	1,578,760,000	1,528,334,989
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,692,405,000	1,545,000,000	1,494,574,989
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34,110,000	33,760,000	33,760,000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu APBD	APBD Pergeseran 8	Realisasi Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	-	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	39,151,000	39,203,190	38,856,690
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13,750,000	13,750,000	13,750,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6,000,000	6,386,790	6,386,790
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9,401,000	11,106,400	10,969,900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,000,000	7,960,000	7,750,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	118,090,000	150,670,000	144,624,552
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11,000,000	11,000,000	10,099,552
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	107,090,000	139,670,000	134,525,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BDM Dengan Kondisi Baik	205,100,000	227,785,000	207,670,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3,600,000	6,785,000	6,739,500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200,000,000	215,000,000	194,931,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,500,000	6,000,000	6,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	-	59,000,000	59,000,000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	59,000,000	59,000,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	59,000,000	59,000,000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu APBD	APBD Pergeseran 8	Realisasi Anggaran
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	-	-	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	31,400,000	28,700,000	27,750,000
	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat $\geq$ Rp. 20.000.000,-			
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	31,400,000	28,700,000	27,750,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	17,900,000	15,200,000	15,200,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13,500,000	13,500,000	12,550,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	46,400,000	46,180,000	45,280,000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	46,400,000	46,180,000	45,280,000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	46,400,000	46,180,000	45,280,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6,000,000	6,000,000	5,990,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan	6,000,000	6,000,000	5,990,000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6,000,000	6,000,000	5,990,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	8,000,000	6,000,000	5,890,000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	8,000,000	6,000,000	5,890,000

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu APBD	APBD Pergeseran 8	Realisasi Anggaran
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3,000,000	3,000,000	2,990,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3,000,000	1,000,000	900,000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2,000,000	2,000,000	2,000,000
JUMLAH		2,180,656,000	2,142,298,190	2,063,396,731

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, maka Kecamatan Bulu memanfaatkan aplikasi-aplikasi pendukung pelaksanaan kegiatan guna mempermudah, mempercepat proses penerapan SAKIP, terdiri dari:

- esr.menpan.go.id
- sipd-ri.kemendagri.go.id
- sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan
- SIRUP dan LPSE
- SAPAKINERJA
- kinerja.bkn.go.id
- coretaxdjp.pajak.go.id
- simpeg.rembangkab.go.id
- kecbulu.rembangkab.go.id

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bulu selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bulu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Bulu.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Bulu tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.3	3.33	100%	Sangat Tinggi	Kementerian PANRB
1.1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	83.28	104.10%	Sangat Tinggi	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Setda Kabupaten Rembang
1.1.2	Mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBN/APBD pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.	Nilai SAKIP	66	64.35	97.50%	Sangat Tinggi	Laporan Hasil Evaluasi oleh Deputi RBKUNWAS Kementerian PANRB.

Sumber : Evalauasi Renja Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut:

- j. Dalam mewujudkan Tujuan Strategis Kecamatan Bulu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” diperoleh realisasi Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Bulu pada Tahun 2024 senilai 3.33 angka atau sebesar 100% dari target IPP yaitu 3.3 angka dengan predikat capaian sangat tinggi .
- k. Sedangkan Capaian Sasaran Strategis melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bulu pada Tahun 2024 adalah 80 angka tercapai 83.28 angka atau sebesar 104.10% dengan predikat capaian sangat tinggi.
- l. Selain itu, capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Bulu pada Tahun Anggaran 2024 mempunyai target 66 angka tercapai 64.35 angka atau 97.5% dengan predikat capaian sangat tinggi.

Hasil target dan realisasi atas program/kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Bulu tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu	66 angka	64,35 angka	97,50	Sangat Tinggi	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90%	90%	100,00	Sangat Tinggi	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	100,00	Sangat Tinggi	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	5 lap	125,00	Sangat Tinggi	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 org/bl	15 org/bl	100,00	Sangat Tinggi	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	12 dok	100,00	Sangat Tinggi	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	1 dok	100,00	Sangat Tinggi	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dok	12 dok	100,00	Sangat Tinggi	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evalausi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dok	12 dok	100,00	Sangat Tinggi	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	100,00	Sangat Tinggi	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	100,00	Sangat Tinggi	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	100,00	Sangat Tinggi	

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	100,00	Sangat Tinggi	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	12 dok	100,00	Sangat Tinggi	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	12 paket	100,00	Sangat Tinggi	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 lap	100,00	Sangat Tinggi	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%	75%	75,00	Sedang	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	0	0,00	Sangat Rendah	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	12 lap	100,00	Sangat Tinggi	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap	100,00	Sangat Tinggi	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	12 lap	100,00	Sangat Tinggi	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	93%	93%	100,00	Sangat Tinggi	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	14 unit	100,00	Sangat Tinggi	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	2 unit	66,67	Sedang	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 unit	8 unit	100,00	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke Camat	98%	98%	100,00	Sangat Tinggi	

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dok	1 dok	100,00	Sangat Tinggi	
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 lap	12 lap	100,00	Sangat Tinggi	
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	96%	96%	100,00	Sangat Tinggi	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 dok	12 dok	100,00	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat $\geq$ Rp. 20.000.000,-	6 desa	6 desa	100,00	Sangat Tinggi	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 lembaga	16 lembaga	100,00	Sangat Tinggi	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 lap	6 lap	100,00	Sangat Tinggi	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 lap	3 lap	100,00	Sangat Tinggi	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	150 orang	150,00	Sangat Tinggi	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	95%	90%	94,74	Sangat Tinggi	
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa dan persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	90 angka	80.32	89,24	Tinggi	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 dok	2 dok	100,00	Sangat Tinggi	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	1 dok	1 dok	100,00	Sangat Tinggi	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	1 dok	1 dok	100,00	Sangat Tinggi	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	16 dok	16 dok	100,00	Sangat Tinggi	

Sumber : Evalauasi Renja Tahun 2024

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dari tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Na	3.1	3.3	3.3	3.33	100%
1.1.1.1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76.00	84.00	84.75	80	83.28	104.10%
1.1.2	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP Kecamatan	61.00	61.51	65.21	66	64.35	97.5%

Sumber : Evalauasi Renja Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut:

- Capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Bulu tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan, target kinerja 3.3 angka terealisasi 3.33 angka atau tercapai 100%. Dapat dilihat setiap tahunnya Indeks Pelayanan Publik mengalami kenaikan dan menunjukkan hasil yang positif.
- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bulu pada tahun 2024 sebesar 83.28 angka telah melampaui target kinerja IKM tahun 2024 yang telah diteapkan sebesar 80 angka atau tercapai 104.10% (melampaui target). Tetapi jika dibandingkan dengan realisasi nilai IKM tahun 2023 dapat dilihat bahwa nilai IKM tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1.47 dibanding

realisasi tahun 2023. Namun, dapat dilihat dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang lebih baik.

- c. Realisasi nilai SAKIP Kecamatan Bulu pada Tahun 2024 sebesar 64.35 angka dan belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 66 angka. Dapat diartikan nilai SAKIP Kecamatan Bulu hanya tercapai 97.5% dari target yang ditetapkan dan mengalami penurunan dari realisasi tahun 2023 sebesar 0.86 angka. Namun secara keseluruhan mengalami kenaikan yang baik.

Perbandingan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dari tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu	61	61	100	62	61,51	99,21	64 angka	65,21 angka	101,89	66 angka	64,35 angka	97,50
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	90	90	100,00	92,5%	92.5%	100,00	90%	90%	100,00
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4	4	100	2	2	100,00	2 dok	2 dok	100,00	2 dok	2 dok	100,00
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2	2	100	7	7	100,00	4 lap	4 lap	100,00	4 lap	5 lap	125,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	100	100	100	100	100,00	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	16	16	100	16	16	100,00	15 org	15 org	100,00	15 org	15 org	100,00
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1	1	100	12	12	100,00	1 dok	1 dok	100,00	12 dok	12 dok	100,00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1	1	100	1	1	100,00	1 lap	1 lap	100,00	1 lap	1 lap	100,00
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	100	100	100	100	100,00	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1	1	100	1	1	100,00	1 dok	1 dok	100,00	12 dok	12 dok	100,00
	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</i>	1	1	100	1	1	100,00	1 dok	100%	100,00	12 dok	12 dok	100,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100	100	100	96	96	100,00	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1	1	100	12	12	100,00	100	100	100,00	12 paket	12 paket	100,00
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1	1	100	12	12	100,00	12 paket	12 paket	100,00	12 paket	12 paket	100,00
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1	1	100	12	12	100,00	12 paket	12 paket	100,00	12 paket	12 paket	100,00
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1	1	100	12	12	100,00	12 paket	12 paket	100,00	12 paket	12 paket	100,00

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	1	1	100	12	12	100,00	12 paket	12 paket	100,00	12 paket	12 paket	100,00
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12	12	100	12	9	75,00	12 paket	12 paket	100,00	12 paket	12 paket	100,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	65	65	100	70	0	0	85%	85%	100,00	100%	75%	100,00
	<i>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Dokumen Pewngelolaan BMD yang dikelola dengan baik</i>	0	1	0	0	0	0	-	-	-	2 unit	0	0
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan</i>	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100,00	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1	1	100	12	12	100,00	12 Lap	12 Lap	100,00	12 Lap	12 Lap	100,00
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	2	2	100	12	12	100,00	12 Lap	12 Lap	100,00	12 Lap	12 Lap	100,00
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1	1	100	12	12	100,00	12 Lap	12 Lap	100,00	12 Lap	12 Lap	100,00
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	100	100	100	93	93	100,00	93%	93%	100,00	93%	93%	100,00
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	14	14	100	14	14	100,00	15 unit	15 unit	100,00	14 unit	14 unit	100,00
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3	3	100	3	3	100,00	4 unit	4 unit	100,00	3 unit	2 unit	66,67
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	8	8	100	8	8	100,00	10 unit	10 unit	100,00	10 unit	8 unit	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke Camat	100	100	100	95	95	100,00	100%	100%	100,00	100%	98%	100,00
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	1 dok	100%
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	100,00	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	2	2	100	12	12	100,00	2 Lap	2 Lap	100,00	12 Lap	12 Lap	100,00
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	100	100	100	100	100,00	96%	96%	100,00	96%	96%	100,00
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	1	1	100	12	12	100,00	16 Lap	16 Lap	100,00	12 Lap	12 Lap	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100	100,00	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	0	0	0	16	16	100,00	6 desa	6 desa	100,00	6 desa	6 desa	100,00
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100	100	100	100	100	100,00	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	0	0	0	0	0	0	16 lembaga	16 lembaga	100,00	16 lembaga	16 lembaga	100,00
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	1	1	100	6	6	100,00	10 Lap	10 Lap	100,00	6 Lap	6 Lap	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100,00	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	100	100	100	100	100	100,00	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	1	1	100	12	12	100,00	3 Lap	3 Lap	100,00	12 Lap	12 Lap	100,00

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100	100	100	100,00	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100	100,00	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	40	40	100	80	80	100,00	130 org	130 org	130,00	100 org	150 org	150,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	100	100	100	95	95	100,00	95%	90%	94,74	95%	90%	94,74
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	93	93	100	93.75	93.75	100,00	93,75%	79,48%	84,78	90%	80,32%	89,24
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	16	16	100	2	2	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00	2 Dok	2 Dok	100,00
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	1	1	100	1	1	100,00	1 dok	1 dok	100,00	-	-	0
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</i>	0	0	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa</i>	0	0	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	100,00	1 Dok	1 Dok	100,00
	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	<i>Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif</i>	0	0	0	0	0	0	1 Dok	1 Dok	100,00	16 Dok	16 Dok	100,00

Sumber: Evaluasi Renja Tahun 2024

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bulu periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.3	3.5	94.28
1.1.1. 1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.28	82	101.56
1.1.2	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP	64.35	70	91.93

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Bulu Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Perbandingan Kemajuan Capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Bulu tahun 2024 dengan target akhir renstra belum mencapai target akhir renstra yang telah ditetapkan, Target kinerja akhir renstra 3.5 angka, terealisasi 3.3 angka atau tercapai 94.28%.
- b. Perbandingan kemajuan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bulu tahun 2024 dengan target akhir renstra ditetapkan sebesar 82 angka dan terealisasi sebesar 83.28 angka. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IKM pada tahun 2024 telah melampaui target akhir renstra yang telah ditetapkan atau tercapai 101.56%.

- c. Perbandingan kemajuan capaian kinerja nilai SAKIP Kecamatan Bulu pada Tahun 2024 dengan target akhir renstra yang telah ditetapkan sebesar 70 angka baru tercapai 64.35 angka, sehingga pada tahun 2024 Kecamatan Bulu belum mencapai target akhir renstra yang telah ditetapkan atau baru tercapai 91.93%.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja sejenis dengan perangkat daerah lainnya

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Bulu dengan Kecamatan Sulang Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Bulu dan Kecamatan Kaliori

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Kecamatan Bulu			Kecamatan Kaliori % Capaian		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100	(7)	(8)	(9)=8/7*100
1.1. 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.3	3.3	100	3.3	3.3	100
1.1. 1.1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	83.28	104.1	82.65	82.36	99.65
1.1. 2	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP	66	64.35	97.5	64	62.91	98.29

Sumber : Evaluasi Renja 2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024:

- a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) baik Kecamatan Bulu maupun Kecamatan Kaliori sama-sama mencapai sesuai target yang ditetapkan. Target IPP sebesar 3,3, terealisasi 3,3, hal ini memberikan arti bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh

Kecamatan Bulu dan Kecamatan Kaliori mempunyai trend meningkat ke arah yang lebih baik.

- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bulu melampaui target kinerja sebesar 83.28 atau 104.10%. Sedangkan nilai IKM Kecamatan Kaliori tercapai 82.36 atau 99.65% dari target kinerja. Hal ini menjelaskan bahwa capaian nilai IKM Kecamatan Bulu lebih tinggi daripada Kecamatan Kaliori. Namun pada dasarnya kedua kecamatan baik Kecamatan Bulu maupun Kecamatan Kaliori memperoleh kategori Sangat Tinggi.
- c. Nilai SAKIP Kecamatan Kaliori terrealisasi sebesar 62.91 atau 98.29% dari target kinerja. Sedangkan di Kecamatan Bulu nilai SAKIP pada tahun 2024 tercapai 64.35 atau 97.5% dari target kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun secara capaian kinerja persentase capaian kinerja Kecamatan Kaliori lebih tinggi daripada Kecamatan Bulu (98.29% dan 97.5%), namun secara nilai realiasi Kecamatan Bulu memiliki nilai SAKIP yang lebih tinggi (62.91 dan 64.35).

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3.3	3.3	100	Peningkatan kemampuan aparatur pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	83.28	104.1	Peningkatan system adminduk terpadu dan ketepatan serta kecepatan prosedur pelayanan, namun terhambat dengan ruang pelayanan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh kecamatan	Memaksimalkan sumber daya yang ada di kecamatan & mengusulkan renovasi ruang pelayanan
1.1.2	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP	70	64.35	97.5	Pendokumentasian arsip kegiatan kurang maksimal, sehingga pada waktu penilaian SAKIP belum menampilkan bukti dukung yang diperlukan, selain itu kompetensi pegawai masih kurang	Menggunakan bukti dukung yang ada dan memanfaatkan pegawai yang tersedia

Sumber : evaluasi renja 2024

Uraian penjelasan dari tabel diatas sebagai berikut:

- Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bulu pada tahun 2024 tercapai 100% dikarenakan kemampuan aparatur pelayanan dalam melaksanakan tugasnya bisa dikatakan mumpuni dan mampu melayani masyarakat dengan baik. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka semua hambatan akan terselesaikan.
- Peningkatan system adminduk terpadu, ketepatan dan kecepatan dalam prosedur pelayanan menjadi factor penunjang keberhasilan pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, sehingga nilai IKM Kecamatan Bulu melampaui target dari kinerja yang ditetapkan yaitu 83.28 atau 104.10%. Meskipun, ruang pelayanan dan sarana prasarana pendukung yang ada di Kecamatan Bulu masih kurang memadai. Renovasi ruang pelayanan dan sarana prasarana pendukung akan diusulkan untuk perencanaan di tahun berikutnya.

- c. Dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dicapai nilai SAKIP Kecamatan Bulu sebesar 64.35 atau 97.5% dari target capaian kinerja yang ditetapkan. Pendokumentasian arsip kegiatan masih kurang maksimal, sehingga pada waktu penilaian SAKIP belum menampilkan bukti dukung yang diperlukan, selain itu kompetensi pegawai di masing-masing kasi dan kasubag masih kurang.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu	66 angka	64,35 angka	97,50	Ketersediaan data untuk pemenuhan evaluasi AKIP	Melengkapi kekurangan data yang dibutuhkan untuk evaluasi AKIP
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90%	90%	100,00	Melibatkan semua unsur dalam proses perencanaan dan evaluasi	Monev rutin per triwulan dilaksanakan sesuai jadwal
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 dok	2 dok	100,00	Proses perencanaan melibatkan semua structural kecamatan	Menampung usulan, masukan, rencana dari kasi dan kasubag
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 lap	5 lap	125,00	Pelaksanaan monev sesuai rencana aksi yang telah disepakati	Monev rutin per tri wulan melibatkan kasi, kasubag
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	100%	100,00	Kemampuan SDM keuangan yang memadai	Memanfaatkan SDM yang tersedia
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	15 org	15 org	100,00	Ketersediaan anggaran mencukupi untuk 1 tahun anggaran	penggajian dan pemberian TPP sesuai ketentuan
	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 dok	12 dok	100,00	Fasilitasi anggaran penatausahaan dan verifikasi tersedia	Personil penatausahaan dan verifikasi memahami tupoksi
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 lap	1 lap	100,00	Laporan keuangan tersaji dengan baik	SDM pembuat laporan harus memahami alur evaluasi dan perencanaan
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Dikelola dengan baik	100%	100%	100,00	Dokumen kepegawaian dikelola sesuai ketentuan	Menggunakan aplikasi kepegawaian yang telah disediakan
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	12 dok	12 dok	100,00	Tersedianya data dan administrasi kepegawaian	Memanfaatkan aplikasi yang tersedia
	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian yang dikelola dengan baik</i>	12 dok	12 dok	100,00	tidak dianggarkan	Memanfaatkan aplikasi yang tersedia
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	100%	100,00	Tercukupinya kebutuhan umum kantor kecamatan	Memanfaatkan ketersediaan anggaran
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 paket	12 paket	100,00	Tersedianya instalasi listrik kantor	Mengatur ulang instalasi listrik yang ada
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 paket	12 paket	100,00	Tersedianya peralatan & perlengkapan kebersihan kantor	Melakukan penghematan peralatan & perlengkapan
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 paket	12 paket	100,00	Tersedianya logistic kantor	Melakukan penghematan penggunaan logistic kantor
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 paket	12 paket	100,00	Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan	Meminimalisir kegiatan cetak dan penggandaan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>12 paket</i>	12 paket	100,00	Tersedianya bahan bacaan kantor	Memanfaatkan media online
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	<i>12 paket</i>	12 paket	100,00	Tercukupinya ATK, Kertas, tinta printer	Melakukan penghematan penggunaan ATK, kertas, tinta
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>12 paket</i>	12 paket	100,00	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Melakukan koordinasi via alat komunikasi, BBM operasional menjadi tanggungan masing-masing pegawai
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%	75%	100,00	Tidak dianggarkan	Memanfaatkan BMD yang ada
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	0	0		
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100,00	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Memaksimalkan penggunaan anggaran
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12 Lap</i>	12 Lap	100,00	Terlaksananya kegiatan surat menyurat dengan baik	Memanfaatkan alat komunikasi dan aplikasi srikandi
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 Lap</i>	12 Lap	100,00	Kebutuhan listrik dan air tercukupi dengan baik	Melakukan penghematan penggunaan listrik dan air
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 Lap</i>	12 Lap	100,00	Gaji THL tercukupi	Memanfaatkan anggaran yang tersedia
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	93%	93%	100,00	Tersedianya BMD dengan kondisi baik	Memanfaatkan BMD yang ada
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>14 unit</i>	14 unit	100,00	Pajak kendaraan dinas terbayarkan	Pemeliharaan kendaraan dinas menjadi beban masing-masing pemakai
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>3 unit</i>	2 unit	66,67	Gedung dalam kondisi baik	Melakukan perawatan dengan menjaga kebersihan
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>10 unit</i>	8 unit	100,00	BMD terpelihara dengan baik	Memanfaatkan BMD dengan baik hanya untuk kegiatan kantor
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke Camat	100%	98%	100,00	Urusan pemerintahan yang dilipahkan ke Camat terlaksana dengan baik	Memaksimalkan SDM pelayanan
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dok	1 dok	100%	Dilaksanakann sesuai dengan perencanaan	Dilaksanakann sesuai dengan perencanaan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100,00	Kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan baik	Memaksimalkan sumber daya yang tersedia
	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>12 Lap</i>	<i>12 Lap</i>	<i>100,00</i>	<i>Pelayanan masyarakat tercapai dengan baik</i>	<i>Memanfaatkan sumber daya yang ada</i>
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	96%	96%	100,00	Penyelenggaraan penunjang kesmas terlaksana dengan baik	Memaksimalkan sumber daya yang tersedia
	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>12 Lap</i>	<i>12 Lap</i>	<i>100,00</i>	<i>Pelaksanaan kewenangan lain terlaksana dengan baik</i>	<i>Memanfaatkan sumber daya yang ada</i>
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarkat	100%	100%	100,00	Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat desa melalui dana desa terlaksana dengan baik	Memanfaatkan dana desa sesuai peruntukannya
		Jumlah desa dengan swadayamasyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	6 desa	6 desa	100,00	Desa dengan swadaya masyarakat ≥Rp 20.000.000,- tercapai	Melakukan pembinaan desa
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100%	100%	100,00	Penetapan APBDesa & penyampaian SPJ tepat waktu	Melakukan monitoring dan pembinaan desa
	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>	<i>16 lem бага</i>	<i>16 lembaga</i>	<i>100,00</i>	<i>Musrenbangcam terlaksana sukses</i>	<i>Memaksimalkan peserta kegiatan musrenbangcam</i>
	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>6 Lap</i>	<i>6 Lap</i>	<i>100,00</i>	<i>Kegiatan pemberdayaan desa berjalan dengan baik</i>	<i>Memantau kegiatan pemberdayaan</i>
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100,00	Ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan tercapai baik	Memaksimalkan ketersediaan sumber daya yang ada
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%	100%	100,00	Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum terselesaikan	Melakukan koordinasi dengan koramil, polsek dan desa
	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>12 Lap</i>	<i>12 Lap</i>	<i>100,00</i>	<i>Sinergitas forkopimcam terjalin baik</i>	<i>Melakukan kegiatan sinergitas bersama forkopimcam</i>
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100,00	Urusan pemerintahan umum terlaksana dengan baik	Memanfaatkan ketersediaan sumber daya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100,00	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kecamatan	Memfaatkan sumber daya yang tersedia
	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>100 org</i>	<i>150 org</i>	<i>150,00</i>	<i>Terlaksananya kegiatan upacara untuk meningkatkan rasa cinta tanah air</i>	<i>Memaksimalkan ketersediaan sumber daya yang ada</i>
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	95%	90%	94,74	SDM Pemerintahan Desa masih perlu peningkatan	Dilaksanakan bimtek pengelolaan keuangan, asset desa dll
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	90%	80,32%	89,24	Pelaksanaan pelayanan di desa masih belum menerapkan standar layanan (SOP)	Memberikan pengarahan, penjelasan kepada pemerintahan desa
	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>2 Dok</i>	<i>2 Dok</i>	<i>100,00</i>	<i>SDM pemerintahan desa masih perlu bimbingan dalam melaksanakan administrasi desa</i>	<i>Pelaksanaan monev setiap triwulan</i>
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</i>	<i>1 Dok</i>	<i>1 Dok</i>	<i>100,00</i>	<i>Pengadministrasian asset desa masih perlu pembenahan</i>	<i>Melaksanakan bimtek pengadministrasian asset desa</i>
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa</i>	<i>1 Dok</i>	<i>1 Dok</i>	<i>100,00</i>	<i>Sinergitas kepala desa dan perangkat desa perlu ditingkatkan</i>	<i>Melaksanakan rakor kades dan perangkat desa</i>
	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	<i>Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif</i>	<i>16 Dok</i>	<i>16 Dok</i>	<i>100,00</i>	<i>Aspirasi desa masih belum terakomodir</i>	<i>Menampung semua usulan desa</i>

3.1.7 Analisis atas efisiensi & Efektivitas penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi & Efektivitas Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Efektivitas (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian		
					(Rp.)	(Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.3	3.3	100	2.142.298.190	2.063.396.731	96,32	1.038	103,82
1.1.1.1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan	80	83.28	104.10	2.142.298.190	2.063.396.731	96,32	1.081	108,08
1.1.2	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	70	64.35	97.5	2.142.298.190	2.063.396.731	96.32	1.012	101,22

Sumber : evaluasi renja 2024

Uraian penjelasan tabel mengenai efisiensi:

- Dalam pencapaian target kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Bulu pada tahun 2024 diperoleh nilai efisiensi sebesar 1.038.
- Sedangkan efisiensi dalam pencapaian target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bulu pada tahun 2024 tercapai nilai efisiensi sebesar 1.081.
- Efisiensi SAKIP Kecamatan Bulu pada tahun 2024 diperoleh nilai efisiensi sebesar 1.012.

Rata-rata Efektivitas indikator tujuan/sasaran Kecamatan Bulu pada tahun 2024 adalah 104.37%, dan dapat diartikan bahwa kegiatan berjalan secara efektif. Nilai rata-rata efektifitas tersebut diperoleh dari:

- a. Tingkat efektivitas nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bulu pada tahun 2024 sebesar 103,82%;
- b. Tingkat efektivitas nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bulu pada tahun 2024 sebesar 108,08%;
- c. Tingkat efektivitas nilai SAKIP Kecamatan Bulu pada tahun 2024 sebesar 101,22%

Efektivitas atas penggunaan sumber daya Kecamatan Bulu Tahun 2024 dapat dilihat bahwa terdapat 1 program dengan predikat tidak efektif dengan nilai efektivitas 96,51 yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Selain itu, terdapat 1 kegiatan yang tidak efektif dengan nilai 90,90 pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Terdapat 1 sub kegiatan dengan predikat tidak efektif dengan nilai 73,53 pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Penyajian efisiensi dan efektifitas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi	Tingkat Efektivitas (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66	64.35	97.50	1,996,418,190	1,919,486,731	96.15	1.014	101,40
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.00	90.00	100.00	-	-	0	0	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100.00	-	-	0	0	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	5	125.00	-	-	0	0	-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100.00	1,578,760,000	1,528,334,989	96.81	1.033	103,29
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15	15	100.00	1,545,000,000	1,494,574,989	96.74	1.034	103,36
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100.00	33,760,000	33,760,000	100.00	1.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100.00	-	-	0	0	-
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00	100.00	100.00	-	-	0	0	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	100.00	-	-	0	0	-
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	100.00	-	-	0	0	-
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100.00	39,203,190	38,856,690	99.12	1.009	100,89
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	100.00	-	-	0	0	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100.00	-	-	0	0	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100.00	13,750,000	13,750,000	100.00	1.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100.00	6,386,790	6,386,790	100.00	1.000	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	100.00	-	-	0	0	-
	Penyediaan Bahan/Material	12	12	100.00	11,106,400	10,969,900	98.77	1.012	101,24
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100.00	7,960,000	7,750,000	97.36	1.027	102,71
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	75.00	75.00	-	-	0	0	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	0	0	-	-	0	0	-
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100.00	150,670,000	144,624,552	95.99	1.042	104,18
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100.00	-	-	0	0	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100.00	11,000,000	10,099,552	91.81	1.089	108,92
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100.00	139,670,000	134,525,000	96.32	1.038	103,82
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93	93	100.00	227,785,000	207,670,500	91.17	1.097	109,68
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14	14	100.00	6,785,000	6,739,500	99.33	1.007	100,67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	2	66.67	215,000,000	194,931,000	90.67	0.735	73,53
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	8	100.00	6,000,000	6,000,000	100.00	1.000	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	100	100.00	59,000,000	59,000,000	100.00	1.000	100,00
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	100.00	59,000,000	59,000,000	100.00	1.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	100.00	59,000,000	59,000,000	100.00	1.000	100,00

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi	
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	100	100.00	-	-	0	0	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100.00	-	-	0	0	-
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100.00	-	-	0	0	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	12	100.00	-	-	0	0	-
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6	6	100.00	28,700,000	27,750,000	96.69	1.034	103,42
		100	100	100.00				0	-
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100.00	28,700,000	27,750,000	96.69	1.034	103,42
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16	16	100.00	15,200,000	15,200,000	100.00	1.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	6	100.00	13,500,000	12,550,000	92.96	1.076	107,57
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.00	100.00	100.00	46,180,000	45,280,000	98.05	1.019	101,99
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100.00	100.00	100.00	46,180,000	45,280,000	98.05	1.019	101,99
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	100.00	46,180,000	45,280,000	98.05	1.019	101,99
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	100	100.00	6,000,000	5,990,000	99.83	1.002	100,17
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100.00	6,000,000	5,990,000	99.83	1.002	100,17
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	150	100.00	6,000,000	5,990,000	99.83	1.503	100,17
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	95	90	94.74	6,000,000	5,890,000	98.17	0.965	96,51
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90	80.32	89.24	6,000,000	5,890,000	98.17	0.909	90,90
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	2	100.00	3,000,000	2,990,000	99.67	1.003	100,33
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	1	100.00	1,000,000	900,000	90.00	1.111	111,11
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1	100.00	-	-	0	0	-
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16	16	100.00	2,000,000	2,000,000	100.00	1.000	100,00

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	100				Menunjang	Mencapai target yang ditetapkan
1.1.1.1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	104.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	100,00	Menunjang	Capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan
1.1.1.1.1				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan
1.1.1.1.1.1				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan
1.1.1.1.1.2				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan
1.1.1.1.1.2.1				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan
1.1.1.1.2				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat $\geq$ Rp. 20.000.000,-	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan
1.1.1.1.2					Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100,00	Menunjang	
1.1.1.1.2.1				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa dan Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan
1.1.1.1.2.1.1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1 .2.1.2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan
1.1.1.1 .3				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan
1.1.1.1 .3.1				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan
1.1.1.1 .3.1.1				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan
1.1.1.1 .4				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan baik	94,74	Menunjang	Ada peningkatan capaian
1.1.1.1 .4.1				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	89,24	Menunjang	Ada peningkatan capaian kinerja
1.1.1.1 .4.1.1				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan
1.1.1.1 .4.1.2				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan
1.1.1.1 .4.1.3				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan
1.1.1.1 .4.1.4				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan
1.1.1.1 .5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .5.1				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1 .5.1.1				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan
1.1.2	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP	66			97.50	Menunjang	Sudah mendapatkan capaian yang maksimal
1.1.1.1 .6				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Kec. Bulu	97.50	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.1.2				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.2.2				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.2.3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target yang ditetapkan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1 .6.3				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.3.1				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.3.2				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan umum	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.4.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.4.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.4.3				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.4.4				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.4.5				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.4.6				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.4.7				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.5				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	75,00	Menunjang	Tidak tersedia anggaran
1.1.1.1 .6.5.1				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	Tidak Menunjang	Tidak tersedia anggaran
1.1.1.1 .6.6				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1 .6.6.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.6.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.6.3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.7				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Dengan Kondisi Baik	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.7.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target
1.1.1.1 .6.7.2				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66,67	Menunjang	Menyesuaikan ketersediaan anggaran
1.1.1.1 .6.7.3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00	Menunjang	Realisasi kinerja sesuai target

Sumber : evaluasi renja 2024

Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel diatas dapat disimpulkann bahwa semua program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bulu pada tahun 2024 menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59.000.000,-	59.000.000,-	100,00
1.1.1.1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	59.000.000,-	59.000.000,-	100,00
1.1.1.1.1.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	59.000.000,-	59.000.000,-	100,00
1.1.1.1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0	0	0
1.1.1.1.1.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0
1.1.1.1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	0	0
1.1.1.1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	0	0
1.1.1.1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.700.000	27.500.000	95,82
1.1.1.1.2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28.700.000	27.500.000	95,82
1.1.1.1.2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.200.000	15.200.000	100,00
1.1.1.1.2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.500.000	12.300.000	91,11
1.1.1.1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.180.000	45.280.000	98,05
1.1.1.1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	46.180.000	45.280.000	98,05
1.1.1.1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	46.180.000	45.280.000	98,05
1.1.1.1.4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.000.000	5.890.000	98,17
1.1.1.1.4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.000.000	5.890.000	98,17
1.1.1.1.4.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000	2.990.000	99,67
1.1.1.1.4.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.000.000	900.000	90,00

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.1.4.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0	0
1.1.1.1.4.1.4	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2.000.000	2.000.000	100,00
1.1.1.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.000.000	5.990.000	99,83
1.1.1.1.5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.000.000	5.990.000	99,83
1.1.1.1.5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6.000.000	5.990.000	99,83
1.1.1.1.6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.996.418.190	1.919.486.731	96,15
1.1.1.1.6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
1.1.1.1.6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
1.1.1.1.6.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
1.1.1.1.6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.578.760.000	1.528.334.989	96,81
1.1.1.1.6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.545.000.000	1.494.574.989	96,74
1.1.1.1.6.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.760.000	33.760.000	100,00
1.1.1.1.6.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0
1.1.1.1.6.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
1.1.1.1.6.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0
1.1.1.1.6.3.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0
1.1.1.1.6.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.203.190	38.856.690	99,12
1.1.1.1.6.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
1.1.1.1.6.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
1.1.1.1.6.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.750.000	13.750.000	100,00
1.1.1.1.6.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.386.790	6.386.790	100,00
1.1.1.1.6.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
1.1.1.1.6.4.6	Penyediaan Bahan/Material	11.106.400	10.969.900	98,77
1.1.1.1.6.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.960.000	7.750.000	97,36
1.1.1.1.6.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
1.1.1.1.6.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
1.1.1.1.6.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.670.000	144.624.552	95,99
1.1.1.1.6.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
1.1.1.1.6.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000	10.099.552	91,81
1.1.1.1.6.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.670.000	134.525.000	96,32
1.1.1.1.6.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.785.000	207.670.500	91,17

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.1.6.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.785.000	6.739.500	99,33
1.1.1.1.6.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	215.000.000	194.931.000	90,67
1.1.1.1.6.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	6.000.000	100,00

Sumber : evaluasi renja 2024

Uraian penjelasan tabel:

Anggaran Kecamatan Bulu pada tahun 2024 sebesar Rp2.142.298.190,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.063.396.731,00 atau tercapai 96,32%.

BAB IV

PENUTUP

Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Bulu Tahun 2024 ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolok ukur. Pada tahun 2024, 2 (dua) indikator sasaran Kecamatan Bulu telah tercapai 100% untuk nilai indeks pelayanan public (IPP) dengan nilai 3.33 dan tercapai 104.10% untuk nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM). Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bulu telah berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024.
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan mendukung kinerja kecamatan ditentukan oleh beberapa factor antara lain adanya anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, kerjasama dan partisipasi semua pihak terkait. Dengan harapan keberhasilan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk masa yang akan datang.
3. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Bulu adalah:
 - Adanya koordinasi yang melibatkan camat dan semua kepala seksi, kepala sub bagian dan aparatur Kecamatan Bulu dalam pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan.
 - Ketersediaan aplikasi perencanaan dan pengelolaan keuangan memudahkan perangkat daerah dalam melakukan perencanaan, penatausahaan keuangan dan evaluasi kinerja.
4. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Kecamatan Bulu adalah:
 - Minimnya dukungan anggaran pelaksanaan fasilitasi pelayanan minimnya dukungan anggaran pelaksanaan fasilitasi pelayanan adminduk;
 - Sarana dan Prasarana Kecamatan Bulu kurang memadai;

- Banyaknya kegiatan yang harus difasilitasi (PBB, Posyandu, Penanggulangan Kemiskinan, stunting dll) dan tidak mendapatkan dukungan anggaran;
- Jumlah pegawai di Kecamatan Bulu semakin berkurang karena banyak pegawai pensiun;
- Rendahnya kemampuan SDM kecamatan yang perlu ditingkatkan

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Bulu adalah sebagai berikut:

1. Dalam menyusun perencanaan sebaiknya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, sehingga masing-masing seksi bisa sepenuhnya menyusun kebutuhan anggarannya secara optimal sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di masing-masing seksi.
2. Banyaknya aplikasi yang harus digunakan dalam hal perencanaan dan penatausahaan keuangan yang selalu berubah dari tahun ke tahun menjadikan kendala dalam hal percepatan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Bulu, maka diharapkan pegawai yang terlibat dalam perencanaan dan keuangan harus lebih sigap, cepat dan tanggap serta punya minat untuk belajar baik secara online maupun melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan pelaksanaannya.
3. Banyaknya pegawai di Kantor Kecamatan Bulu yang akan memasuki purna tugas, maka kebutuhan penambahan pegawai sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang.
4. Camat dan unsur pimpinan harus lebih proaktif dan komunikatif serta memahami hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan penatausahaan keuangan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Bulu ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Bulu kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak

lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .



MOCHAMAD SOLEH, SE, MM
NIP. 19700505 199003 1 008

LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Tim Penyusun LKJIP
- Lampiran 2 Dokumen Renstra (5 tahun)
- Lampiran 3 Dokumen Renja Tahun 2024
- Lampiran 4 DPA Induk Tahun 2024
- Lampiran 5 DPPA Pergeseran 8 Tahun 2024
- Lampiran 6 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024
- Lampiran 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024
- Lampiran 8 Laporan realisasi dan capaian indicator per triwulan 2024
- Lampiran 9 SK IKU Kecamatan Bulu
- Lampiran 10 Cascading Kecamatan Bulu
- Lampiran 11 SK Peta Jabatan Kecamatan Bulu
- Lampiran 12 Profil Indikator Kinerja
- Lampiran 13 SK SOP Pengumpulan Data Kinerja
- Lampiran 14 Realisasi Anggaran 2024
- Lampiran 15 IKPD Kecamatan 2024
- Lampiran 16 LHE SAKIP Kecamatan Bulu Tahun 2023
- Lampiran 17 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023
- Lampiran 18 Proses Bisnis Kecamatan Bulu
- Lampiran 19 Bezeting ASN Kecamatan Bulu
- Lampiran 20 RKT 2025